

**PENGEMBANGAN SIMRS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT UNTUK MENINGKATKAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIREKTUR RSUD PROVINSI NTB**

Munawir Ansari

RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat

e-mail: munawiransarist@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadapi tantangan kompleks yang berdampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan pengembangan SIMRS dan merekomendasikan strategi yang paling efektif untuk meningkatkan capaian IKU. Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis kebijakan Bardach (2012) melalui delapan langkah sistematis, dengan evaluasi berdasarkan kriteria ekonomi, sosial, politik, dan kelayakan teknis. Hasil penelitian mengidentifikasi empat alternatif kebijakan: penyusunan digital roadmap, penguatan SDM IT dan literasi digital, peningkatan infrastruktur dan anggaran digitalisasi, serta pembentukan unit pengelola SIMRS. Berdasarkan evaluasi komprehensif, penyusunan dan implementasi Digital Roadmap RSUD NTB meraih skor tertinggi (18) dan menjadi rekomendasi utama. Kebijakan ini dianggap paling komprehensif karena mencakup aspek penguatan SDM, peningkatan infrastruktur, tata kelola data digital, dan sejalan dengan kebijakan nasional Health Digital Transformation Strategy (HDTs). Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat membangun fondasi transformasi digital yang kuat, mempercepat integrasi sistem, dan mendorong pencapaian IKU Direktur RSUD Provinsi NTB.

Kata Kunci: SIMRS, Indikator Kinerja Utama, Transformasi Digital, Digital Roadmap, Analisis Kebijakan Bardach

ABSTRACT

The development of the Hospital Management Information System (SIMRS) at the West Nusa Tenggara Provincial General Hospital faces complex challenges that impact the achievement of the Director's Key Performance Indicators (IKU). This study aims to analyze policy alternatives for SIMRS

Article history

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism checker no 80

Prefix DOI :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

development and recommend the most effective strategy to improve IKU achievement. The research method uses Bardach's (2012) policy analysis approach through eight systematic steps, with evaluation based on economic, social, political, and technical feasibility criteria. The results identify four policy alternatives: digital roadmap preparation, strengthening IT human resources and digital literacy, improving digital infrastructure and budgeting, and establishment of a SIMRS management unit. Based on comprehensive evaluation, the preparation and implementation of the West Nusa Tenggara Provincial General Hospital Digital Roadmap achieved the highest score (18) and became the main recommendation. This policy is considered the most comprehensive as it covers aspects of human resource strengthening, infrastructure improvement, digital data governance, and aligns with the national Health Digital Transformation Strategy (HDTs). The implementation of these recommendations is expected to build a strong foundation for digital transformation, accelerate system integration, and boost the achievement of the Director's Key Performance Indicators at the West Nusa Tenggara Provincial General Hospital.

Keywords: *Hospital Management Information System, Key Performance Indicators, Digital Transformation, Digital Roadmap, Bardach Policy Analysis*

PENDAHULUAN

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (RSUD Provinsi NTB) sebagai rumah sakit kelas A Pendidikan yang merupakan rujukan tertinggi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki peran yang strategis dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat NTB sekaligus menjadi ujung tombak penyelenggaraan layanan kesehatan rujukan tingkat lanjut nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat, RSUD Provinsi NTB dihadapkan pada tuntutan peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, serta akuntabilitas kinerja yang harus terukur melalui capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur Rumah Sakit yang harus dilaporkan secara berkala pada aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB (Pemprov NTB, 2025).

Dalam rangka digitalisasi yang mengharuskan rumah sakit menggunakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat tata kelola rumah sakit. SIMRS berfungsi tidak hanya sebagai alat administrasi pelayanan,

tetapi juga sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan berbasis data yang berimplikasi langsung terhadap peningkatan kinerja rumah sakit. Melalui SIMRS yang terintegrasi dan berorientasi pada mutu, rumah sakit dapat mengoptimalkan pelayanan pasien, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang ada di rumah sakit (Lubis, 2024).

Implementasi SIMRS di berbagai rumah sakit daerah, termasuk RSUD Provinsi NTB, masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan seperti belum optimalnya integrasi data antar unit layanan, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi informasi kesehatan, serta kurangnya pemanfaatan data dalam perencanaan strategis menjadi faktor penghambat utama dalam mencapai target IKU. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam penyajian laporan kinerja, ketidakterpaduan informasi antar bidang, dan rendahnya pemanfaatan analisis data untuk pengambilan keputusan manajerial di RSUD Provinsi NTB.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit telah menegaskan pentingnya penerapan SIMRS yang terpadu, terstandar, dan berkesinambungan. Pengembangan SIMRS yang efektif tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga strategi utama dalam mendukung transformasi digital layanan kesehatan dan peningkatan kinerja institusional. Melalui kebijakan ini fasilitas kesehatan diwajibkan menjalankan sistem pencatatan riwayat medis pasien secara elektronik dengan menggunakan Rekam Medik Elektronik (RME) dan proses transisi dilakukan paling lambat 31 Desember 2023 yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

Secara umum, implementasi aplikasi SIMRS di RSUD Provinsi NTB telah mencakup beberapa modul utama, seperti pendaftaran pasien, pelayanan rawat jalan dan rawat inap, rekam medis elektronik, farmasi, laboratorium, serta radiologi. Dengan demikian, pengembangan SIMRS di RSUD Provinsi NTB menjadi kebutuhan mendesak yang harus direncanakan secara sistematis dan terukur. SIMRS yang dikembangkan secara tepat akan berkontribusi langsung terhadap peningkatan capaian IKU Direktur RSUD Provinsi NTB, khususnya dalam aspek mutu pelayanan, efisiensi manajemen, dan kepuasan masyarakat. Analisis kondisi eksisting, identifikasi kendala, serta rekomendasi strategi pengembangan aplikasi SIMRS sebagai instrumen penguat tata kelola rumah sakit berbasis kinerja (RSUD Provinsi NTB, 2024).

Isu yang muncul pada Pengembangan aplikasi SIMRS RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah belum optimalnya implementasi dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mendukung peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Adapun masalah yang terjadi akibat belum optimalnya implementasi dan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mendukung peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur RSUD Provinsi NTB, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan SIMRS di RSUD Provinsi NTB
2. Keterbatasan SDM bidang Teknologi Informasi (IT)
3. Infrastruktur jaringan dan perangkat keras belum memadai
4. Rendahnya literasi digital tenaga kesehatan
5. Belum adanya roadmap pengembangan SIMRS jangka panjang
6. Perubahan regulasi BPJS Kesehatan.

RSUD Provinsi NTB telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan kesehatan, namun sistem tersebut belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya mendukung peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur RSUD Provinsi NTB. Keterbatasan SDM IT, infrastruktur jaringan yang belum memadai, keterbatasan perangkat keras, proses digitalisasi yang lama dan regulasi BPJS yang sering berubah dan rendahnya literasi digital tenaga kesehatan, serta belum maksimalnya pemanfaatan data untuk perencanaan strategis, menyebabkan SIMRS belum mampu secara efektif mendorong akselerasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur RSUD Provinsi NTB.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) merupakan tulang punggung digital dari operasional rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik, SIMRS didefinisikan sebagai bagian integral dari sistem informasi kesehatan nasional yang berfungsi untuk mengelola data klinis dan administratif rumah sakit secara terintegrasi dan berkesinambungan. Secara ideal, SIMRS dirancang untuk mendukung efisiensi pelayanan kesehatan, menyediakan data *real-time* yang akurat untuk pengambilan keputusan manajerial, serta menjamin keamanan, kerahasiaan, dan integritas data pasien. Dengan demikian, SIMRS bukan hanya sekadar alat bantu, tetapi suatu sistem strategis yang menentukan kualitas dan efektivitas pelayanan kesehatan.

2. Teori Transformasi Digital di Sektor Kesehatan

Transformasi digital melampaui sekadar adopsi teknologi; ia merupakan proses perubahan organisasi yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi secara mendalam untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan (Vial, 2019). Menurut Vial (2019), transformasi digital didefinisikan sebagai proses mendasar yang mengubah entitas organisasi melalui kombinasi teknologi informasi, sumber daya manusia (SDM), dan model bisnis yang baru untuk menciptakan nilai yang lebih tinggi. Dalam konteks rumah sakit, transformasi ini mencakup penerapan sistem rekam medis elektronik, telemedicine, *big data analytics*, *artificial intelligence* (AI), serta integrasi sistem informasi antar unit layanan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2020) menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital di fasilitas kesehatan sangat bergantung pada empat pilar utama: (1) Kepemimpinan dan Tata Kelola Digital, (2) Kompetensi SDM dan Literasi Digital, (3) Infrastruktur dan Sistem Data

yang andal, serta (4) Pendanaan yang Berkelanjutan. Keempat komponen ini harus berjalan sinergis agar transformasi digital dapat memberikan dampak yang signifikan.

3. Konsep Literasi Digital dan Kompetensi SDM IT

Keberhasilan suatu sistem teknologi sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. UNESCO (2018) mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan individu untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, kritis, kreatif, dan etis. Dalam konteks rumah sakit, rendahnya literasi digital di kalangan tenaga kesehatan (seperti dokter, perawat, dan tenaga kefarmasian) dapat menjadi penghambat utama dalam implementasi SIMRS, menyebabkan penolakan, kesalahan input data, dan underutilization sistem.

Di sisi lain, ketersediaan dan kompetensi SDM IT yang mengelola dan mengembangkan SIMRS juga sangat krusial. Keterbatasan ini dapat dikaji melalui teori *Human Capital* yang dikemukakan oleh Becker (1993). Teori ini menyatakan bahwa peningkatan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan sumber daya manusia merupakan suatu investasi modal yang penting untuk mendukung produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Tanpa SDM IT yang memadai dan kompeten, kualitas layanan dan pemeliharaan sistem digital rumah sakit akan menurun.

4. Konsep dan Prinsip Perencanaan Strategis Digital (Digital Roadmap)

Perencanaan strategis digital, atau yang sering disebut sebagai *digital roadmap*, adalah sebuah dokumen rencana komprehensif yang mengarahkan organisasi untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi secara bertahap, terukur, dan berorientasi pada hasil (OECD, 2021). Ketiadaan *digital roadmap* dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti inkonsistensi arah pengembangan SIMRS, tumpang tindih sistem (*system fragmentation*), dan rendahnya efektivitas investasi teknologi.

Ross, Sebastian, dan Beath (2017) mendefinisikan perencanaan strategis digital sebagai sebuah kerangka manajemen yang mengintegrasikan strategi bisnis yang ada dengan strategi teknologi digital untuk menciptakan nilai yang lebih kompetitif dan keberlanjutan dalam sebuah organisasi. Dalam konteks lembaga publik seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), *digital roadmap* berfungsi sebagai peta jalan yang memastikan bahwa setiap inisiatif transformasi digital selaras dengan visi, misi, dan sasaran kinerja organisasi (World Bank, 2021). Dengan adanya peta jalan ini, pengembangan SIMRS dapat terarah, terencana, dan selaras dengan tujuan strategis rumah sakit.

5. Kebijakan dan Regulasi yang Relevan

Penguatan sistem informasi rumah sakit dan transformasi digital di Indonesia didukung oleh sejumlah kebijakan dan regulasi, antara lain:

1. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.
2. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik.

3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Sektor Kesehatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025-2029.
7. Rencana Strategis RSUD Provinsi NTB Tahun 2025-2029.

METODE

Penelitian ini berfokus pada permasalahan utama dalam pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di RSUD Provinsi NTB, yaitu belum adanya kebijakan strategis dan perencanaan digital (digital roadmap) yang komprehensif. Kondisi ini berdampak langsung pada belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur RSUD Provinsi NTB. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini akan melakukan analisis alternatif kebijakan dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Eugene Bardach (2012).

Metode analisis kebijakan Bardach dipilih karena menyediakan kerangka kerja yang sistematis, logis, dan berbasis bukti melalui delapan langkah yang saling terkait. Langkah-langkah tersebut akan diimplementasikan sebagai berikut: Pertama, mendefinisikan masalah secara jelas dengan merumuskan kesenjangan antara kondisi SIMRS yang ada saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan. Kedua, mengumpulkan bukti dan data pendukung yang relevan, baik data kuantitatif (seperti data kinerja dan statistik) maupun kualitatif (melalui wawancara, tinjauan dokumen, dan observasi). Ketiga, membangun alternatif solusi kebijakan yang realistis dan dapat diterapkan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi.

Setelah alternatif dirumuskan, langkah keempat adalah menetapkan kriteria evaluasi yang akan digunakan untuk menilai setiap alternatif. Kriteria yang akan diterapkan meliputi efektivitas, efisiensi, keadilan, kelayakan, dan keberlanjutan. Kelima, memproyeksikan outcome dengan memperkirakan dampak dan konsekuensi dari setiap alternatif, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Keenam, menganalisis trade-off yang muncul dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan kebijakan. Berdasarkan analisis tersebut, langkah ketujuh adalah memutuskan alternatif kebijakan mana yang paling tepat dan layak untuk diimplementasikan di RSUD Provinsi NTB. Langkah kedelapan sekaligus tahap akhir adalah menyusun dan menyampaikan rekomendasi kebijakan dalam sebuah narasi yang persuasif dan mudah dipahami oleh pihak pembuat kebijakan.

Pendekatan Bardach sangat relevan dalam konteks transformasi digital sektor kesehatan karena bersifat empiris, adaptif terhadap kompleksitas lingkungan rumah sakit, dan berorientasi pada solusi. Metode ini juga sejalan dengan semangat tata kelola digital (digital governance) dan kebijakan nasional, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Transformasi Digital Kesehatan. Dalam penelitian ini, kerangka Bardach akan

diterapkan untuk menganalisis berbagai opsi strategis seperti investasi infrastruktur, penguatan SDM IT, atau penyusunan peta jalan digital guna menentukan kebijakan pengembangan SIMRS yang paling efektif, efisien, dan berkelanjutan bagi RSUD Provinsi NTB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Alternatif Kebijakan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan utama yaitu belum adanya perencanaan strategis digital yang komprehensif di RSUD Provinsi NTB, maka dirumuskan empat alternatif kebijakan sebagai berikut:

- 1. Alternatif 1: Penyusunan dan Implementasi Digital Roadmap RSUD NTB
- 2. Alternatif 2: Penguatan SDM IT dan Literasi Digital Tenaga Kesehatan
- 3. Alternatif 3: Peningkatan Infrastruktur dan Anggaran Digitalisasi
- 4. Alternatif 4: Pembentukan Unit Pengelola SIMRS dan Tata Kelola Data

2. Evaluasi Alternatif Kebijakan

Evaluasi terhadap keempat alternatif kebijakan dilakukan menggunakan metode Bardach (2012) dengan empat kriteria utama: ekonomi, sosial, politik, dan kelayakan teknis. Setiap alternatif diberi skor 1-5 (1 = rendah, 5 = sangat tinggi), dimana semakin tinggi skor alternatif semakin direkomendasikan.

Tabel 1. Evaluasi Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Ekonomi	Sosial	Politik	Kelayakan Teknis	Total Skor
Digital Roadmap RSUD NTB	4	5	5	4	18
Penguatan SDM & Literasi Digital	4	5	4	3	16
Infrastruktur & Anggaran Digitalisasi	3	4	3	4	14
Unit Pengelola SIMRS & Tata Kelola Data	3	3	4	3	13

3. Analisis Dampak Kebijakan

Analisis dampak dari masing-masing alternatif kebijakan menunjukkan implikasi dan risiko yang berbeda-beda bagi RSUD Provinsi NTB.

Tabel 2. Analisa dampak kebijakan

Alternatif	Dampak terhadap RSUD NTB	Risiko Implementasi
Digital Roadmap	Meningkatkan efektivitas dan arah kebijakan digital; mempercepat capaian IKU Direktur RSUD	Keterlambatan implementasi bila koordinasi antarunit lemah

SDM & Literasi Digital	Meningkatkan kompetensi pegawai dan efisiensi pelayanan	Tingginya kebutuhan pelatihan dan supervisi
Infrastruktur Digital	Peningkatan konektivitas dan kelancaran operasional	Ketergantungan pada anggaran dan vendor
Tata Kelola Data	Keamanan dan integritas data meningkat	Keterbatasan SDM keamanan siber

4. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan evaluasi komprehensif dengan metode Bardach (2012), kebijakan yang direkomendasikan adalah Penyusunan dan Implementasi Digital Roadmap RSUD NTB. Pemilihan kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa digitalisasi rumah sakit bukan sekadar pengadaan sistem, tetapi transformasi menyeluruh yang membutuhkan arah strategis dan perencanaan yang komprehensif.

Digital Roadmap RSUD NTB dinilai sebagai instrumen utama yang dapat memastikan integrasi antar unit, efisiensi data, peningkatan kompetensi digital pegawai, serta akselerasi pencapaian Indikator Kinerja Utama Direktur RSUD Provinsi NTB. Kebijakan ini juga secara komprehensif mencakup aspek penguatan SDM, peningkatan infrastruktur, dan tata kelola data digital, serta sejalan dengan arah kebijakan nasional *Health Digital Transformation Strategy* (HDTs) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

5. Arah dan Fokus Rekomendasi Kebijakan

Arah kebijakan yang diusulkan difokuskan pada pembentukan kerangka kebijakan internal RSUD Provinsi NTB yang mengatur:

1. Penyusunan Peraturan Direktur RSUD Provinsi NTB tentang Pengembangan dan Tata Kelola SIMRS, sebagai dasar hukum pelaksanaan program digitalisasi rumah sakit.
2. Pembentukan Tim Transformasi Digital RSUD NTB, yang memiliki tugas menyusun Digital Roadmap, mengkoordinasikan pengembangan SIMRS, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.
3. Penguatan kapasitas SDM dan budaya digital melalui pelatihan teknis dan nonteknis bagi tenaga kesehatan dan staf administrasi rumah sakit.
4. Standarisasi dan integrasi sistem data agar seluruh unit pelayanan menggunakan sistem yang saling terhubung dan sesuai dengan standar interoperabilitas SATUSEHAT Kemenkes.
5. Alokasi anggaran khusus untuk transformasi digital melalui mekanisme penganggaran rutin dan kerja sama strategis dengan pihak ketiga (penyedia).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan landasan teori, konsep, dan kebijakan nasional yang relevan, dapat disimpulkan bahwa percepatan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktur RSUD Provinsi NTB memerlukan pendekatan strategis

dan sistematis dalam transformasi digital. Sebagai tindak lanjut, direkomendasikan serangkaian kebijakan utama. Pertama, penerbitan Peraturan Direktur yang secara khusus mengatur pengembangan SIMRS dan tata kelola data digital, yang mencakup aspek perencanaan, penganggaran, pengelolaan, dan pengawasan, sekaligus menjamin ketersediaan anggaran untuk keberlanjutan sistem. Kedua, penyusunan Digital Roadmap RSUD Provinsi NTB untuk periode 2025-2030, yang berfungsi sebagai pedoman strategis utama dengan target waktu dan indikator keberhasilan yang terukur untuk memandu seluruh proses transformasi digital. Ketiga, pembentukan Tim Transformasi Digital yang memiliki tugas dan tanggung jawab jelas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh sistem digital rumah sakit. Keempat, pelaksanaan program peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital bagi tenaga kesehatan secara berkelanjutan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan teknis. Kelima, pengalokasian dukungan anggaran khusus yang berkelanjutan untuk transformasi digital, yang dapat bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta dijajakinya kolaborasi dengan mitra strategis untuk mendapatkan solusi dan sumber daya terbaik bagi pengembangan sistem informasi rumah sakit. Secara keseluruhan, kelima rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat membangun fondasi yang kuat dan terintegrasi untuk mempercepat digitalisasi, yang pada akhirnya akan mendorong pencapaian IKU dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Provinsi NTB. Namun yang menjadi Rekomendasi kebijakan paling utama adalah implementasi Digital Roadmap dan kebijakan tata kelola data, RSUD Provinsi NTB yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, memperkuat transparansi, dan mempercepat pencapaian IKU Direktur RSUD Provinsi NTB sesuai arah kebijakan transformasi digital sektor kesehatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 2023. Panduan Implementasi Pembaruan Sistem VClaim dan INA-CBGs Versi 7.0 Tahun 2023. Jakarta: BPJS Kesehatan.
- Bagian Pendidikan dan Pelatihan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2023. Laporan Survei Literasi Digital Tenaga Kesehatan. Mataram: RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Bagian Perencanaan dan Pengembangan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2024. Laporan Tahunan (Laptah) RSUD Provinsi NTB Tahun 2024. Mataram : RSUD Provinsi NTB.
- Bagian Perencanaan dan Pengembangan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2023. Laporan Tahunan (Laptah) RSUD Provinsi NTB Tahun 2023. Mataram : RSUD Provinsi NTB.
- Bardach, Eugene. 2012. A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving. 4th ed. Thousand Oaks, CA: CQ Press.
- Becker, Gary S. 1993. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press.
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2024. Laporan Evaluasi Infrastruktur dan Sistem Jaringan Internal Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2024. Mataram: Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Provinsi NTB. 2024. Laporan Implementasi SIMRS RSUD Provinsi NTB Tahun 2024. Mataram : RSUD Provinsi NTB.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2022. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Jakarta : Kemenkes RI.
- Lubis. 2024. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dalam Meningkatkan Tata Kelola dan Kinerja Rumah Sakit di Era Digitalisasi. Jakarta : Mitra Medika Press.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2021. The Digital Transformation of the Public Sector: Helping Governments Respond to the Needs of the 21st Century. Paris: OECD Publishing.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029. Mataram : Bappeda Provinsi NTB.
- Vial, Gregory. 2019. Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda. The Journal of Strategic Information Systems 28.